

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Cetakan kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi. In A. d. Abimanyu, *Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia.

Santoso. (2012). *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke-25. Bandung: CV Alfabeta.

Soentoro, A. I. (2015). *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian dengan Aplikasi Statistika*. Depok: PT. Tamedia Bakti Persada.

Sumber Jurnal:

Amelia, M. (2015). Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pada Walikota Probolinggo. *Jurnal Politik Muda Vol. 4* , 319-327.

Anggraini, Ragil, N., & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pemerintah dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 6* .

- Arthur, B., Ferraz, C., & Rios, J. (2015). Political Dynasties and The Quality of Government. *Working Paper Standfod University* .
- Asako, Ueda, M., & Matsubayashi, T. (2015). Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science* , 5-32.
- Bisma, I., Gede, D., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3* .
- Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 5 No. 1* , 1-14.
- Febrianto, B. H. (2020). *Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti*. Jakarta: republika.co.id.
- Fotanella, A., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* , 1-24.
- Girsang, H. A., & Yuyetta, E. N. (2015). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting* , 1-11.
- Haryanto, J. T. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Irmawati, Febrian, D., & Pratolo, S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas

- Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2013.
E Jurnal Akuntansi .
- Makhfudz, M. (2002). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Vol 3(2)* , 11-13.
- Maryanti. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal ilmiah akuntansi dan Humanika.2(1)* , 1-30.
- Mendoza, V. S. (2012). An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress. *Philippine Political Science Journal* , 132-145.
- Moisiu, A. (2013). Decentralization and The Increased Autonomy in Local Governments. *Procedia-Social and Behavioral Sciences 109* , 459-463.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2* , 176-185.
- Muraiya, N. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 2* , 236-253.
- Nankyung, C. (2009). Democracy And Patrimonial Politics In Local Indonesia. *Indonesia Vol 88* , 131-164.

- Nurhayati. (2015). Analisis rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rakan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 4 No, 1*.
- Nuritomo, & Rossieta, H. (2014). Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok.
- Pasan, E. (2013). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden di Filipina di Tahun 2001-2011. 16.
- Proborini, H. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (p. 784).
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerinntah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 2, No 2* , 102-108.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik, Vol. 1 No. 1* , 98-122.
- Querubin, P. (2016). Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines. *Journal of Political Science* , 151-181.
- Rossi, M. (2013). The Causes of Political Dynasties in Democratic Countries.
- Saud, & Trisha. (2020). Desentralisasi Fiskal, Politik Dinasti, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Bukti Empiris di Indonesia. *Akuntabilitas* .

- Sidik. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Makalah Seminar Kebijakan Otonomi Daerah.
- Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Agregasi* , 72-90.
- Susilo, T., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2015. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* , 153-170.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- BPK RI. (2020, Juni 30). *LKPD TA 2019 : Provinsi Jabar Raih Kembali WTP*. Retrieved Juli 10, 2021, from jabar.bpk.go.id: <https://jabar.bpk.go.id/15042/>

- Harahap, S. (2020, Juli 221). *Fraksi Golkar Jabar Kritisi Potensi Kerugian Negara*. Retrieved Juli 10, 2021, from tagar.id: <https://www.tagar.id/fraksi-golkar-jabar-kritisi-potensi-kerugian-negara>
- Haryas Prambawanti, M. A. (2020, Juli 01). *Jabar Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut, Ridwan Kamil Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK*. Retrieved Mei 25, 2021, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/11202771/jabar-raih-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-ridwan-kamil-siap-tindaklanjuti?page=all>
- Irfan, M. (2020, Juli 29). *Sebab Dinasti Politik, Titi: Dari Kaidah Hukum, Calon Alternatif Sulit, Pemilih, hingga Biaya Tinggi*. Retrieved Mei 28, 2021, from pikiran-rakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01639838/sebab-dinasti-politik-titi-dari-kaidah-hukum-calon-alternatif-sulit-pemilih-hingga-biaya-tinggi>
- Jabar Ekspres. (2020, November 04). *Masalah Aset Pemdaprov Jabar Masih Jadi Raport Merah Laporan BPK RI*. Retrieved Juli 10, 2021, from jabarekspres.com: <https://jabarekspres.com/berita/2020/11/04/masalah-aset-pemdaprov-jabar-masih-jadi-raport-merah-laporan-bpk-ri/>
- Nasir, H. (2020, Juni 30). *Bandung Barat Pos*. Retrieved Mei 28, 2021, from <https://www.bandungbaratpos.com/2020/06/30/pemkab-bandung-barat-terima-opini-wtp-dprd-masih-banyak-pr-yang-harus-diselesaikan/>
- Nugraha, Y. N. (2019, Januari 20). *Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Retrieved Juli 10, 2021,

from kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>

Nugroho, K. B. (2016, Juni 16). *Politik Dinasti Ada di 61 Kepala Daerah*. Retrieved Mei 2021, 2021, from news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/wah-ketergantungan-terhadap-dana-transfer-dari-pemerintah-pusat-turun-24483?page_y=145

Paat, Y. (2017, Oktober 02). *Ini Penyebab Maraknya Dinasti Politik*. Retrieved Juli 13, 2021, from www.beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/455759/ini-penyebab-maraknya-dinasti-politik>

Pusparisa, Y. (2020, Desember 12). *Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020*. Retrieved Mei 28, 2021, from katadata.com: <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fd3653b92a95/jejar-ing-dinasti-politik-di-pilkada-2020>

Rahman, H. (2020, Juni 29). *Pemkab Indramayu Raih WTP dari BPK Untuk Kelima Kalinya, Tapi Masih Ditemukan Beberapa Permasalahan*. Retrieved Mei 28, 2021, from TribunJabar.id: <https://jabar.tribunnews.com/2020/06/29/pemkab-indramayu-raih-wtp-dari-bpk-untuk-kelima-kalinya-tapi-masih-ditemukan-beberapa-permasalahan?page=2>.

Saputro, F. A., & Hemawan, B. (2020, Juli 29). *Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti*. Retrieved Mei 28, 2021, from

republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qe7iil354/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti>

Sotta, S. (2020, Desember 05). *Pilkada: Puluhan istri petahana jadi calon kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar?* Retrieved Mei 28, 2021, from BBC.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55121695>

Supriyatna, I. (2020, Juni 27). *BPK Sematkan Opini WTP untuk LKPD Cianjur Tahun Anggaran 2019*. Retrieved Mei 28, 2021, from Suara.com: <https://www.suara.com/bisnis/2020/06/27/071428/bpk-sematkan-opini-wtp-untuk-lkpd-cianjur-tahun-anggaran-2019>

Wildan, M. (2020, Oktober 05). *Wah, Ketergantungan Terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Turun*. Retrieved Mei 2021, 2021, from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/wah-ketergantungan-terhadap-dana-transfer-dari-pemerintah-pusat-turun-24483?page_y=145

Zulfikar, M. (2021, Maret 24). *Pakar Paparkan Penyebab Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Rendah*. Retrieved Mei 28, 2021, from <https://www.antaraneews.com/berita/2060118/pakar-paparkan-penyebab-indeks-kemandirian-fiskal-daerah-rendah#mobile-nav>